

BAB II METODE PENELITIAN IDEOLOGI KOMUNISME DALAM LUKISAN HENDRA GUNAWAN

Dalam kajian literatur yang digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya tentang topik yang dibahas berupa teori dan temuan yang didapat merupakan bahan acuan yang sangat berguna sebagai data pendukung.

Adapun penelitian yang mengangkat topik seputar Lekra dan konflik yang terjadi pada sekitar tahun 1950-1965 banyak diangkat dari berbagai prespektif dan disiplin ilmu pengetahuan, namun dalam penelitian ini ada 2 jenis penelitian yang menjadi bahan acuan yaitu penelitian yang menilai situasi yang berkembang saat itu dari sisi politik, dan penelitian yang melihat secara langsung karya seniman dari sisi kesenian.

II.1.1 Studi Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya banyak menggambarkan konflik kebudayaan 1950-1965 bukan saja merupakan gesekan antar kelompok *onderbouw* partai, tapi juga merupakan persaingan ideologi yang semakin meruncing pasca berakhirnya Perang Dunia II dan merupakan penanda awal dimulainya masa Perang Dingin dan terbentuknya poros negara dunia ketiga yang bersama-sama menghadapi dua ideologi besar yang eksis pada masa itu.

Waluyo (2009) dalam tesisnya yang membahas tentang peristiwa yang terjadi dibalik pencarian identitas kebudayaan Indonesia baru, menganggap bahwa ideologi dan aliran yang dianut kalangan seniman di Indonesia yang berperan dalam proses penggalian identitas kebudayaan Indonesia baru pada masa itu, akan selalu terpengaruh situasi politik yang berkembang didalam dan luar negeri sebagaimana juga mempengaruhi arah politik penguasa pada masa itu

Sementara itu Herlambang (2011) secara langsung menyoroti komunisme dan Liberalisme sebagai ideologi yang menjadi akar konflik kebudayaan, sebagaimana dikatakannya, Herlambang mengaitkan keberadaan peran Congress For Cultural Freedom sebagai organisasi filantropi Amerika Serikat yang mendorong

berkembangnya gagasan-gagasan liberal untuk membendung pengaruh komunisme di Indonesia. Sementara sebaliknya Uni Sovyet juga melakukan hal serupa baik melalui perantara lembaga-lembaga swadaya maupun melalui partai politik seperti PKI yang tergabung dalam Komintern.

Dalam pernyataannya, herlambang menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia bukan saja didorong, tapi ditunggangi kepentingan ideologi liberalisme dan komunisme untuk saling menumbangkan satu sama lain.

Penelitian terakhir yang melihat permasalahan dari latar belakang politik adalah karya Alexander Supartono yang dibukukan dengan judul *Lekra vs Manikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-1965*, dalam penelitian ini Supartono (2000) menunjukkan adanya gesekan ideologi liberalisme yang dalam istilah pada masa itu (1950-1965) dikenal dengan humanisme universal, dengan ideologi komunisme yang mengedepankan karya realisme sosial.

Selanjutnya Djajadi (2009) mengungkapkan permasalahan ini tidak hanya tentang politik, sebab ada sisi kesenian yang muncul namun terkaburkan oleh situasi yang cenderung memanas pada masa itu, maupun setelahnya. Dalam penelitian tersebut, Djajadi memaparkan, sebagai pihak yang kalah dalam pertarungan politik setelah PKI dan simpatisannya dilarang pasca peristiwa G30S ada kecenderungan untuk menilai karya seniman Lekra sebagai produk komunisme yang diciptakan semata-mata demi kepentingan politis dan mengesampingkan estetika.

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik yang terjadi saat itu lebih banyak difahami sebagai konflik antar ideologi yang kemudian berdampak terhadap kebudayaan yang terlahir setelahnya, tuduhan gencar dilakukan tanpa adanya pengkajian lebih lanjut.

Selain beberapa penelitian yang melihat permasalahan dari latar belakang politik diatas, penelitian ini juga merujuk beberapa penelitian lain yang melakukan kajian terhadap pesan yang tersembunyi dari sebuah objek visual. Seperti thesis Ivan Kurniawan berjudul *Sensualitas dan Kecenderungan Fetishisme pada Fotografi Bertema Model*, yang menyoroti pesan lain yang terkandung dari sekumpulan foto yang diunggah di salah satu sosial media. Juga penelitian yang dilakukan Martin

Suryajaya bertajuk Estetika Orde Baru, yang membahas politik propaganda yang disusupkan lewat produk-produk kesenian oleh rezim Orde Baru. Kedua penelitian tersebut akan digunakan sebagai bahan referensi dalam proses interpretasi data.

II.1.2 Metode Analisis Isi Lukisan Hendra Gunawan

Dalam pembahasan sebelumnya juga telah diungkapkan bahwa dalam proses interpretasi data lukisan yang terkumpul, penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif dengan pendekatan sumatif.

Analisis isi sendiri merupakan salah satu metode yang pada awalnya muncul sebagai bagian dari penelitian komunikasi dengan sumber berupa teks, namun dalam perkembangannya, metode ini kemudian telah banyak digunakan sebagai metode analisis terhadap artefak visual, seperti dalam 2 penelitian diatas. Dengan alasan seperti diungkapkan Bhartes (dalam Kurniawan, 2013) bahwa setiap objek visual dapat dibaca layaknya teks, sehingga metode-metode yang biasa digunakan dalam menganalisa artefak berbentuk teks, dapat digunakan dalam penelitian dengan objek data visual seperti dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, objek visual yang telah terkumpul diinterpretasi mengacu pada sumber pustaka dan hasil wawancara narasumber, untuk kemudian dilakukan penghitungan hasil interpretasi menggunakan indikator yang dirancang kedalam sebuah sistem *matrix coding*.

Sistem *matrix coding* dalam penelitian ini sendiri disusun berdasarkan pada interpretasi terhadap teks pembanding, yaitu teks Prinsip Kesenian 1959 dengan alasan yang akan dijelaskan lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya.

Hasil penghitungan dengan indikator dalam *matrix coding* tersebut kemudian akan dihitung untuk melihat persentasi dari faham ideologi dan kepentingan politik yang terepresentasikan oleh lukisan Hendra Gunawan.

II.2. Identitas Kebudayaan Indonesia Baru

II.2.1 Latar Belakang

Sebagai sebuah faham dalam dunia kesenian dan kesusastraan realisme sosialis pernah menjadi faham yang dominan dikalangan sastrawan dan seniman di Indonesia. Meskipun faham tersebut sudah berkembang di Indonesia sekitar tahun 1910 dibuktikan dengan munculnya karya-karya Mas Marco Kartodikromo, namun faham ini baru mendapat perhatian luas mulai tahun 1950-1965.

Kembali ke masa tersebut, seniman dan budayawan Indonesia tengah dipenuhi oleh semangat revolusi kebudayaan yang merupakan bagian dari pencarian identitas kebudayaan Indonesia yang terlepas dari bentuk kebudayaan kolonial-imperialis, Lindsay (dalam Hakim, 2017) menyebut jika situasi tersebut merupakan lanjutan dari gejala pos-Kolonialis yang mendera setiap negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia II, menurut Lindsay gejala tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat kebanyakan negara yang baru merdeka pasca perang dunia II adalah korban dari sistem iperialisme dan kolonialisme, sehingga kemerdekaan yang didapat pasca perang dianggap sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemandirian dengan terlepas dari segala hal yang dianggap merepresentasikan kolonialisme dan imperialisme.

Di Indonesia sendiri, selepas revolusi fisik dan pengakuan kedaulatan oleh belanda pada 27 desember 1949, berbagai kelompok seniman dan sastrawan berlomba-lomba menawarkan gagasan yang menurut mereka merepresentasikan kebudayaan Indonesia. Kelompok-kelompok sastrawan dan seniman ini pun masuk kedalam perdebatan dan persaingan dalam upaya menggali bentuk kebudayaan Indonesia baru. Persaingan dan perdebatan yang oleh sastrawan Taufik Ismail disebut sebagai tahun-tahun Prahara Budaya.

II.2.2. Lembaga Kebudayaan Ditengah Revolusi Indonesia Baru

Menurut BRG (2018) Secara garis besar, seniman dan sastrawan di Indonesia terbagi kedalam 3 kelompok besar aliran kebudayaan yang mendapat pengaruh dari kebudayaan dunia, ketiga kelompok tersebut adalah kelompok yang terpengaruh

budaya sosialis (realisme sosialis), budaya islam, dan budaya barat (humanisme universal), ketiga kelompok tersebut dikemudian hari menjadi kelompok dominan yang saling bersaing hingga tumbang rezim Orde Lama.

Ditengah situasi penuh persaingan itulah realisme sosialis mendapatkan perhatian luas di Indonesia, doktrin kebudayaannya yang mengharuskan setiap karya berdasarkan pada realitas yang memihak kaum tertindas dapat diterima secara luas ditengah masyarakat. Dengan mengesampingkan pengaruh lain, banyak kalangan yang menganggap bahwa doktrin realisme sosialis dapat menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia saat itu yang baru saja melewati tahun-tahun sulit sepanjang revolusi fisik 1945-1949.

Kebangkitan realisme sosialis pasca revolusi fisik sendiri ditandai dengan berdirinya Lembaga Kebudayaan Rakyat, pada tanggal 17 Agustus 1950. Berdirinya Lembaga ini yang diinisiasi beberapa tokoh partai selanjutnya memicu partai-partai lain turut membentuk lembaga kesenian, tujuannya untuk memenangkan ideologi masing-masing ditengah perdebatan bentuk kebudayaan Indonesia. Tercatat beberapa lembaga yang dianggap terafiliasi partai antara lain Lesbumi (NU/Islam) LKN (PNI) Lekrindo (Parkindo) dan LKIK (Partai Khatolik Indonesia), selain lembaga kebudayaan yang terafiliasi partai tercatat beberapa seniman yang menolak bentuk afiliasi partai kemudian menandatangani manifest kebudayaan Indonesia 1963, kelompok ini selanjutnya dikenal sebagai kelompok manifest kebudayaan.

Goenawan Mohammad, seorang budayawan yang juga penandatangan manifest mengungkapkan jika Manifest Kebudayaan adalah upaya untuk lepas dari intervensi politik, dan merupakan cara bagi kelompok ini untuk memelihara independensi ditengah tekanan revolusi yang begitu besar, yang terjadi pasca kemerdekaan (2010 h.58). Pernyataan Goenawan memang menggambarkan situasi ketika itu dimana intervensi politik sangat terasa karena selain terafiliasi (secara resmi maupun tidak) lembaga-lembaga tersebut juga turut dipengaruhi ideologi partai, namun upaya kelompok manifest untuk tetap independen juga diragukan kalangan seniman pengusung realisme sosialis, alasannya kelompok Manifest Kebudayaan mendeklarasikan diri sebagai penganut Humanisme Universal, faham

yang dinilai mendukung liberalisme dan dianggap merrepresentasikan budaya barat yang merupakan lawan alami realisme sosialis.

Komentar keras sempat muncul dari tokoh Lekra, Pramoedya Ananta Toer dalam majalah *lentera*, menurut Toer (1964) yang mengatakan bahwa kelompok Manifesto Kebudayaan muncul ketika Lekra sedang memerangi neo-Kolonialisme dan liberalisme yang diusung Amerika Serikat, maka pantas saja jika kemudian mereka juga menjadi sasaran dari perlawanan yang dilakukan Lekra.

Perdebatan panjang tentang identitas kebudayaan Indonesia yang terjadi sepanjang 1950-1965 sendiri pada selanjutnya tidak saja berisi argumentasi kelompok-kelompok yang berusaha menawarkan bentuk kebudayaan yang menurut mereka merepresentasikan Indonesia, dikemudian hari perdebatan tersebut berlanjut menjadi persaingan tidak sehat yang melibatkan unsur politik didalamnya.

Sebagaimana dijelaskan diatas, eratnya hubungan politik antara partai-lembaga kesenian maupun sebaliknya juga turut menentukan posisi dan nasib masing-masing lembaga ditengah masyarakat Indonesia. Maka dapat dikatakan jika nasib lembaga kebudayaan sangat bergantung kepada peta perpolitikan Indonesia sepanjang tahun 1950-1965, sebagai gambaran umum, pada tanggal 17 agustus 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden untuk kembali ke UUD 1945 dan menetapkan berlakunya sistem demokrasi terpimpin sebagai lanjutan dari gagalnya sistem demokrasi liberal (1950-1959), selanjutnya Presiden Soekarno mengenalkan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) sebagai pilar bangsa, konsep Nasakom sendiri disusun oleh Presiden Soekarno untuk merangkul faksi-faksi besar yang ada saat itu, adapun pengambilan kebijakan, Presiden dibantu oleh Front Nasional yang terdiri dari faksi-faksi Nasakom tersebut. Konsep ini pun mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak.

Menurut Riyanto (2015) peta sosial politik pasca berlakunya demokrasi terpimpin mengerucut menjadi 3 faksi kekuatan besar saat itu, yaitu faksi pendukung Soekarno (PNI) faksi ABRI (TNI dan Polri) dan faksi kiri (PKI dan kelompok sosialis) adapun sisa faksi yang ada (NU dan kelompok kanan lainnya) juga turut bersaing memperebutkan pengaruh terhadap presiden Soekarno. Sebagai catatan

ABRI sendiri termasuk kedalam peta sosial-politik karena merupakan bagian dari Front Nasional yang ikut menentukan kebijakan Presiden.

Berdasarkan peta sosial politik tersebut, posisi realisme sosialis sebagai paham kesenian dan kesusastraan maupun Lekra sebagai lembaga secara praktis menjadi sangat strategis, kedekatan Lekra dengan PKI bukan hanya membuat Lekra Menjadi lembaga kebudayaan terbesar karena PKI mendapat posisi 4 pada pemilu 1955 (6 juta pemilih) tapi juga karena PKI dekat dengan Soekarno, disatu sisi posisi tersebut membuat Lekra lebih mudah dalam berkegiatan, namun disisi lain seiring dengan semakin besarnya pengaruh PKI semakin banyak pula kelompok yang berusaha menjatuhkannya dan sebagai lembaga yang dianggap terafiliasi, Lekra dengan realisme sosialisnya juga dijadikan sasaran yang sama.

Dalam situasi strategis tersebut Lekra juga semakin gencar menyerang lawannya, salah satu pendiri Lekra yang juga merupakan petinggi PKI Njoto sempat melontarkan pernyataan yang dianggap menyerang kelompok penganut paham Humanisme Universal, dalam kongres I Lekra tahun 1959, Njoto mengeluarkan konsep politik sebagai panglima, menurutnya kebebasan mencipta harus tetap didasarkan pada tujuan yang seiring dengan Revolusi Indonesia Baru "Kekeliruan besar mempersilahkan kebudayaan berjalan sendiri, polos, tanpa bimbingan politik". Baginya kebebasan harus disadari dengan tanggung jawab dan sikap politik yang memihak revolusi, maka seniman yang bersikap abai terhadap revolusi dan hanya sibuk memikirkan kepuasan pribadinya adalah musuh revolusi (*Lekra dan Geger*, 2014). Dalam posisinya sebagai salah satu pimpinan Lekra pernyataan tersebut selain menjadi penegasan sikap dan posisi Lekra dalam menghadapi revolusi yang dipancarkan Presiden Soekarno, juga merupakan bentuk penolakan mereka terhadap pandangan kelompok manifesto kebudayaan, yang oleh Njoto disebut 'gelandangan tanpa arah', karena hanya bertumpu humanisme yang bersifat universal tapi seolah menciptakan jarak pada persoalan yang dekat dengan rakyat dan mengabaikan persoalan mendasar terkait nasib bangsa.

Pernyataan tersebut yang kemudian diikuti dengan penandatanganan manifest kebudayaan oleh beberapa seniman juga memancing reaksi penguasa, Presiden Soekarno (dikutip Hastuti 2009) berpendapat bahwa Manifesto Kebudayaan

bertentangan dengan cita-cita revolusi, sebab tidak boleh ada manifest lain selain Manifesto Republik Indonesia apalagi menunjukkan sikap bertentangan dengannya.

Tindak lanjut dari pernyataan Soekarno berakhir dengan pembubaran Manifesto Kebudayaan dan pelarangan humanisme universal, seniman dan sastrawan yang terlibat pun mendapat diskriminasi dari rezim saat itu.

Melihat latar belakang politik yang begitu rumit, yang turut mengiringi perjalanan Lekra sebagai sebuah lembaga, dimulai dari kedekatannya dengan PKI, para pendirinya yang juga merupakan petinggi partai, hingga kedekatannya dengan penguasa, membuat Lekra sebagai lembaga kebudayaan di cap sebagai kepanjangan tangan PKI atau intervensi politik diarahkan kebudayaan, Al-Hakim (2017) mengungkapkan jika realisme sosialis di Indonesia hanya difahami sebagai doktrin komunisme di Indonesia, hal tersebut menjadi wajar mengingat kelompok-kelompok kiri termasuk PKI sendiri gencar mengkampanyekan aliran ini, baik sebagai paham maupun sebagai praktik dalam proses kreatif, namun stigma realisme sosialis sebagai doktrin politik terlalu disederhanakan mengingat saat ini penggambaran realisme sosialis hanya selesai pada tahap melihat situasi dan langkah politik Lekra, lebih jauh dari itu penggambaran realisme sosialis tidak dikaji lewat karya yang dikeluarkan seniman penganut realisme sosialis sepanjang tahun 1950-1965.

II.3 Lembaga Kebudayaan Rakyat

II.3.1 Sejarah Lekra

Dalam pemaparan sebelumnya telah dijelaskan jika perdebatan dalam upaya pencarian kebudayaan Indonesia baru telah mendorong lahirnya berbagai lembaga kebudayaan dan kelompok yang menolak pelembagaan tersebut yang dikenal sebagai kelompok Manifesto Kebudayaan. Berbagai lembaga kebudayaan yang terlahir pada periode tersebut dikemudian hari diidentikan sebagai lembaga yang terafiliasi terhadap beberapa partai maupun ideologi, salah satu lembaga yang dianggap terafiliasi dengan partai adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat yang dianggap sebagai *onderbouw* Partai Komunis Indonesia.

Lembaga Kebudayaan Rakyat yang biasa disingkat Lekra didirikan pada tanggal 17 agustus tahun 1950, atas inisiasi 2 orang sastrawan sekaligus tokoh Partai Komunis Indonesia D.N.Aidit, Njoto, dan 2 orang budayawan non partai, A.S. Dharta, M.S. Ashar. Lembaga ini pada awal berdirinya menghimpun beberapa sanggar kesenian yang menyelenggarakan kesenian rakyat, maka Lekra sendiri sebenarnya bukan organisasi, Lekra lebih cocok dikatakan sebagai badan koordinasi antar lembaga kesenian, sebab seniman-seniman yang tergabung dalam Lekra justru bergabung karena sanggar, atau kelompok seni mereka tergabung dalam Lekra, kebanyakan mereka tidak bergabung secara perseorangan (Yuliantri, Dahlan, 2008:h.19).

II.3.2 Lekra dan PKI

Sejak awal didirikan, hampir tidak ada bukti kuat yang menunjukkan keterkaitan Lekra secara formal dengan Partai Komunis Indonesia, tidak ada satupun dokumen organisasi baik yang disimpan oleh Lekra maupun PKI yang menunjukkan bahwa kedua organisasi ini terkait secara resmi. Sempat tersebar kabar jika D.N.Aidit pernah berusaha menjadikan Lekra sebagai organ resmi PKI, namun Njoto menolaknya sehingga Lekra tidak pernah secara resmi menjadi bagian dari PKI.

Tuduhan bahwa Lekra adalah lembaga *onderbouw* PKI dan bekerja berdasarkan instruksi PKI diduga muncul karena dalam beberapa hal terdapat keterkaitan personal antara anggota Lekra dengan anggota PKI. Sebagai contoh 2 dari 4 orang inisiator pendirian Lekra yaitu D.N.Aidit, dan Njoto adalah anggota PKI, bahkan dikemudian hari keduanya dikenal sebagai *triumvirate*, 3 serangkai pucuk pimpinan partai komunis tersebut yang menurut Al-Hakim (2018) hanya satu hal yang bersifat insidental saja, dan kebetulan bisa dijadikan senjata oleh lawannya untuk menghabisi Lekra. Selain itu terdapat banyak anggota PKI yang juga secara resmi tercatat sebagai anggota Lekra, meskipun sekretaris umum kedua Lekra Joebar Ajoeb pernah mengatakan bahwa tidak semua anggota Lekra adalah anggota PKI, bahkan adapula anggota Lekra yang tidak mengenal komunime (KPG, 2015:h.27)

Keterkaitan Lekra dengan PKI juga banyak dikaitkan dengan teks prinsip kesenian 1961 Lekra yang memuat poin politik sebagai panglima, jika memang politik

adalah patokan dalam berkesenian bagi Lekra, maka politik yang dijadikan panglima dalam berkesenian tentunya politik PKI, karena dalam berbagai hal terutama menyangkut ideologi hanya PKI yang dapat dikatakan seiring dengan aliran Lekra. Hal tersebut juga dikuatkan oleh fakta jika prinsip kesenian 1961 yang dianut Lekra dirancang oleh Njoto, salah satu dari 3 pimpinan PKI. Namun dibalik segala hal yang entah kebetulan ataupun tidak, keterkaitan PKI dan Lekra secara formal masih menjadi perdebatan banyak pihak hingga saat ini. Dikutip dari buku *Lekra dan Geger 1965* (2015) Joebar Ajoeb pernah membantah jika Lekra disebutkan sebagai bagian dari PKI, sebab anggota Lekra tidak harus PKI, bahkan 2 orang tokoh mereka A.S. Dharta dan M.S.Ashar bukan penganut komunisme, namun pernyataan tersebut ditanggapi oleh sastrawan Ajip Rosidi sebagai upaya Ajoeb untuk menyelamatkan diri, karena pernyataan tersebut diungkapkan Ajoeb pasca peristiwa 30 September 1965, Ajip menganggap jika itu hanya upaya Ajoeb untuk menghindari proses hukum, buktinya menurut Ajip sebelum tahun 1965 tidak ada satupun anggota Lekra yang menolak jika dikaitkan dengan PKI, dan pernyataan Ajoeb tidak lebih dari upayanya menyelamatkan Lekra selepas rezim Orde Baru secara resmi melarang penyebaran paham Marxisme-Komunisme beserta semua lembaganya di Indonesia (Rosidi, 2014;h.10).

Terlepas dari pertanyaan tentang hubungan resmi yang mengikat Lekra dengan PKI, selama masa berdirinya hubungan Lekra-PKI telah sama-sama memberikan keuntungan satu sama lain, PKI sebagai salah satu partai besar yang menempati posisi keempat dalam pemilu tahun 1955 dengan 6 juta suara jelas memiliki pengaruh kuat dalam pemerintahan, terlebih kebijakan pemerintahan Presiden Soekarno yang memasukan paham komunisme sebagai pilar benegara dalam konsep Nasakom membuat hubungan PKI sangat dekat dengan pemerintah yang juga berarti kedekatan antara pemerintah dengan Lekra. Sebaliknya pengaruh Lekra didunia kesenian juga dibutuhkan oleh PKI demi mewujudkan kepentingan partai karena pada masa itu Lekra dikenal memiliki pengaruh yang luas dikalangan seniman.

Salah satu keuntungan yang didapatkan Lekra karena kedekatan dengan PKI dan pemerintah adalah ketika Lekra harus berseteru dengan kelompok Manifest Kebudayaan, sejak awal berdirinya kelompok Manifest Kebudayaan memang

dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap Lekra, kelompok ini menolak gagasan Lekra bahwa kesenian harus berpihak pada kepentingan rakyat dan lebih menitik beratkan kepada kebebasan individu dalam mencipta, Manifest Kebudayaan yang terkenal dengan jargon : Seni Untuk Seni dianggap bentuk perlawanan terhadap Kebudayaan rakyat, dan akhirnya dilarang oleh Pemerintah dan beberapa tokohnya ditangkap dan diintimidasi.

Namun Kedekatan Lekra-PKI pada akhirnya juga membuat keduanya tenggelam bersamaan, peristiwa Gerakan 30 September yang dianggap didalangi oleh PKI membuat partai tersebut dibubarkan dan komunisme sebagai ideologi yang dianutnya turut dilarang oleh pemerintah, peristiwa tersebut juga turut menyeret Lekra yang dianggap sebagai organisasi *onderbouw* PKI. Selain pembubaran, pemerintah Orde Baru juga menangkap sejumlah tokoh Lekra, dan yang tidak kalah penting menyita dan melarang segala bentuk karya yang dihasilkan anggota Lekra, menandai awal dari hilangnya aliran realisme sosialis dari dunia kebudayaan Indonesia.

II.4 Kanonisasi Produk Kebudayaan

II.4.1 Latar Belakang

Dalam sebuah seminar kebudayaan bertajuk Ada Sastra dan Lekra di Gedung Indonesia Menggugat, yang diadakan 21 April 2010, Saut situmorang menjelaskan jika perdebatan tentang bentuk kebudayaan Indonesia pada perkembangannya telah mendorong masing-masing kelompok untuk melakukan praktek kanonisasi bentuk karya, menurut Saut, kanonisasi bentuk karya adalah bagian dari intervensi politik yang telah ada sejak era Balai Pustaka yang kemudian semakin subur prakteknya sepanjang tahun 1950-1965. Kanonisasi tersebut dapat dikatakan politis karena setiap kelompok bukan hanya mengatur bagaimana seharusnya bentuk sebuah karya, tapi juga tentang bentuk-bentuk karya yang seharusnya ditolak, saut menggambarkan jika pada masa Balai Pustaka, sebuah karya yang tidak masuk standar dalam kanon sastra adalah bacaan liar, situasi semacam itupun terjadi dimasa Prahara Budaya 1950-1965.

Praktek kanonisasi bentuk kesenian yang terjadi ditengah persaingan lembaga kebudayaan, yang disadari ataupun tidak, telah banyak disusupi kepentingan politik selanjutnya semakin memicu perdebatan yang mengarah kepada debat kusir dimana kedua pihak hanya saling mencari kesalahan satu sama lain. Seperti kelompok pengusung manifesto kebudayaan yang menuduh Prinsip Kesenian 1961 Lekra sebagai bentuk intervensi PKI melalui Njoto, Rosidi (2006) menyatakan bahwa para anggota Lekra yang tidak pernah protes terhadap keputusan PKI yang menetapkan patron ‘Politik Sebagai Panglima’ bahkan langsung menetapkannya sebagai pegangan, adalah bukti bahwa meskipun secara sah Lekra-PKI bukan satu kesatuan, namun secara praktek Lekra hanya menjalankan keinginan PKI. Sementara itu Situmorang (2016) mengatakan jika kelompok Manifesto Kebudayaan melalui H.B.Jasin, kemudian Goenawan Mohammad dengan Teater Utan Kayu, dan Komunitas Salihara, adalah penerus praktek kanonisasi sastra Balai Pustaka, yang justru menurutnya telah menjalankan praktek politik sebagai panglima, namun malah menuduh Lekra menggadaikan idealismenya. Bahkan Herlambang (2011) mencurigai jika ada hubungan transaksional dalam bentuk bantuan terhadap lembaga-lembaga yang merupakan jejaring kelompok manifest kebudayaan seperti Freedom Institute dan Komunitas Salihara, yang melandasi hubungan antara kelompok Manifest Kebudayaan dengan lembaga-lembaga asing terkait praktek kanonisasi sastra yang mereka langungkan. Kepentingannya adalah untuk mendorong faham liberal yang didukung oleh negara-negara barat dan membatasi ruang bagi berkembangnya realisme sosialis yang didukung Uni Sovyet.

Namun terlepas dari perdebatan tentang siapa yang sebenarnya digerakan oleh kepentingan politik dalam menerapkan praktek kanonisasi produk kesenian, pada akhirnya Lekra memang menjadi kelompok yang terkena imbas dari persaingan lembaga kebudayaan. Ketika peristiwa G30S pecah dan rezim Orde Baru menetapkan PKI sebagai pelakunya, Prinsip Kesenian 1961 kemudian menjadi alasan rezim Orde Baru untuk turut membubarkan Lekra karena dianggap sebagai bagian dari politik kepentingan PKI.

II.4.2 Prinsip Kesenian 1961

Dalam menjalankan fungsi organisasinya, Lekra dijalankan oleh dewan pengurus yang disebut sebagai sekretariat Lekra yang dipimpin seorang sekretaris umum, pada awal berdirinya terdapat 15 dewan pengurus yang juga sekaligus penandatangan berdirinya Lekra, kelompok yang menyebut diri mereka sebagai peminat dan pekerja kebudayaan di Jakarta tersebut menyatakan bahwa Lekra terlahir sebagai upaya untuk mempertahankan posisi kesenian untuk tetap berada pada garis revolusi 1945, dengan menggunakan kesenian rakyat untuk mengobarkan kembali semangat revolusi ditengah masyarakat.

Dalam Mukadimah Lekra 1950, teks yang berisi dasar pendirian lembaga tersebut, Lekra menyebut jika kebudayaan feodal imperialis adalah kebudayaan yang kontra-Revolusi dan untuk melawannya kebudayaan rakyat harus dipertahankan. Lekra mengklaim jika kebudayaan Indonesia baru adalah kebudayaan rakyat karena rakyat, yang dalam dalam hal ini adalah masyarakat kelas bawah adalah mayoritas masyarakat Indonesia dan merupakan refleksi dari Indonesia itu sendiri. Dari sinilah kemudian terlahir jargon yang kemudian sangat identik dengan Lekra yaitu: Seni Untuk Rakyat.

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang termaktub dalam mukadimah Lekra 1950, terdapat konsepsi kebudayaan yang merupakan langkah strategis untuk mencapai cita-cita tersebut, konsepsi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kesenian, ilmu dan industri adalah dasar-dasar dari kebudayaan, maka harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik kebudayaan.
2. Membuka seluas-luasnya kebebasan individual maupun kolektif dengan demokratisasi kesenian, ilmu dan industri.
3. Rakyat yang dalam hal ini adalah masyarakat proletar sebagai bagian dari mayoritas rakyat Indonesia adalah kekuatan utama perjuangan Kebudayaan Rakyat yang merupakan bagian dari perjuangan secara umum.
4. Menolak faktor-faktor yang menghambat perkembangan kebudayaan rakyat, berarti juga penyatuan kekuatan dalam membangun kebudayaan rakyat.

5. Menumbuhkan sikap kritis terhadap setiap bentuk kebudayaan asing dan kebudayaan kuno dengan hanya mengambil segala hal yang dianggap bersifat praktis bagi kepentingan kebudayaan rakyat.
6. Langkah-langkah yang bersifat pelembagaan untuk mewujudkan cita-cita kebudayaan rakyat.

Selanjutnya dalam kongres pertama Lekra di Surakarta tahun 1959, disusun prinsip yang menjadi pedoman setiap seniman Lekra dalam berkarya, prinsip tersebut dikenal sebagai prinsip 1-5-1 yang kemudian disahkan pada rapat pleno pimpinan pusat Lekra tahun 1961 dengan judul Prinsip Kesenian 1961. Dalam prinsip tersebut Lekra menempatkan politik sebagai panglima (1) dengan lima kombinasi (5) estetis: meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, tradisi baik dan kekinian revolusioner, kreativitas individual dan kearifan massa, realisme sosial dan romantik revolusioner, serta dipraktekan dengan cara turun ke lapangan (1).

Prinsip Kesenian 1961 menjadi patron seniman lekra dalam berkarya dengan memperhatikan 3 aspek yaitu aspek politis, estetis, dan praktis dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Politis

Politik dalam hal ini dimaknai sebagai cara dan orientasi berpikir, sepanjang 1950-1965 ada 2 bentuk kebudayaan yang secara politis berusaha untuk disingkirkan karena dianggap sebagai musuh kebudayaan rakyat yaitu kebudayaan feodal dan kolonial. Secara politis ideologi yang diperjuangkan tentunya ideologi komunisme sosialisme.

2. Estetis

Lima kombinasi kerja dalam berkesenian:

- a. Meluas dan meninggi, sebaran karya seni mesti melebar, sesuai selera masyarakat, dan mudah difahami namun tetap unggul secara kualitas.
- b. Tinggi mutu artistik dan ideologi, karya seni mesti mampu memadukan ideologi sebagai isi dan keindahan sebagai bentuknya,

- c. Memadukan tradisi baik dengan kekinian revolusioner, artinya memadukan tradisi yang positif dengan cita-cita modern.
- d. Memadukan kreativitas individu dengan kearifan masa. Tujuannya supaya karya seni tidak bertentangan dengan cita-cita rakyat,
- e. Memadukan realisme revolusioner dengan romantisme revolusioner, karya dituntut bukan hanya menggambarkan situasi dari revolusi tapi sekaligus menggambarkan kondisi ideal, atau cita-cita revolusi.

1. Praktis

Dalam prakteknya kedua aspek sebelumnya harus dipraktekan sesuai realitas yang sebenarnya dengan syarat yang harus terpenuhi, yaitu penggambaran dalam karya harus merupakan pengalaman langsung dari seniman pembuatnya.

Menurut Ahmadi (2015) keberadaan poin-poin yang bertendensi politis, serta kebijakan PKI-Lekra yang terlihat saling mendukung, kemudian menjadi alasan rezim Orde Baru untuk membubarkan Lekra, khususnya dengan menggunakan prinsip kesenian 1961 sebagai bukti bahwa Lekra sebagai lembaga kesenian, telah berpedoman pada kebijakan, yang menjadi alat kepentingan PKI diranah kesenian.

II.5 realisme sosialis di Indonesia

II.5.1 Situasi Disekitar Tahun 1960

Untuk memahami alasan munculnya tuduhan terhadap kelompok seniman penganut aliran realisme sosialis, sebelumnya perlu difahami pula konteks sosial-politik yang melatarinya dimana terdapat persaingan diantara kelompok penganut realisme sosialis dengan penganut humanisme universal.

Persaingan tersebut dikemudian hari berubah menjadi upaya saling menjatuhkan yang ditandai dengan dibubarkannya kelompok Manifest Kebudayaan oleh Pemerintahan Presiden Soekarno, yang juga menimpa Lekra pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Menurut Sekretaris umum Lekra Joebaar Ajoeb ada beberapa kesamaan antara tujuan Lekra dan Manifest Kebudayaan, seperti digambarkan dalam buku Lekra

dan Geger 1965 (2015) bahwa kesamaan itu antara lain bahwa keduanya dimaklumkan tahun 1950 dan sama-sama bertujuan memajukan kebudayaan Indonesia. Memang bukan hal yang mengherankan ketika melihat adanya kesamaan diantara kedua Lembaga tersebut, pasalnya keduanya sama-sama dibentuk dari, oleh, dan untuk para seniman. Keduanya berisi sastrawan dan seniman yang tidak jarang merupakan kawan dekat.

Terkait sikap, dalam kedua gerakan ini hanya terdapat 2 perbedaan penting. Pertama perbedaan terletak pada orientasi gerakannya. Keduanya sepakat tentang bentuk kebudayaan Indonesia yang harus sesuai jati diri bangsa, namun berbeda pendapat tentang orientasi, Lekra membangunnya dengan membuat struktur yang tertata dan diawasi, sementara Manifest hanya menekankan pada semangat yang dibangun dalam setiap proses pengkaryaan. Kedua, Lekra secara tegas menyatakan seni mereka dibuat untuk rakyat, sementara Manifest lebih mengedepankan individualisme. Kedua hal tersebut menyiratkan sifat lembaga yang berbeda diantara keduanya. Lekra terkesan lebih formal, tertata struktur dan garis komandonya, serta menegaskan bentuk organisasinya yang berorientasi politik, sehingga memunculkan keseragaman dalam bersikap, diluar proses pengkaryaan, sementara Manifest cenderung lebih fleksibel, karena segala sesuatu dikembalikan kepada individu.

Namun untuk melihat persamaan dan perbedaan keduanya, haruslah dilihat sesuai konteks situasi dan kondisi politik pada masa itu. Hal ini terkait kejadian yang melatari munculnya lembaga-lembaga ini yaitu perebutan pengaruh politik pasca dekrit 5 juli 1959.

Situmorang, (dalam Supartono, 2000), segala hal yang terjadi pada peristiwa seputar tahun 1960 tidak boleh dilihat sebagai insiden dalam dunia kebudayaan saja, namun harus dilihat latar belakang politik yang mengiringinya. Maka jika hari ini peristiwa tersebut dibuka kembali untuk menelusurinya harus disertai dengan kajian terhadap situasi politik yang berkembang.

II.5.2 Ideologi ditengah Situasi Politik

Seperti ditegaskan diatas, dalam melihat dan menilai situasi yang berkembang disekitar tahun 1960, setiap hal harus selalu dikaitkan dengan konteks situasi politik yang berkembang saat itu.

Termasuk dalam menilai ideologi yang dianut kedua lembaga, Lekra dan Manifest Kebudayaan. Lekra dikenal dengan ideologi komunisme, yang dalam ranah pengkaryaan diterjemahkan sebagai aliran realisme sosialis, sementara Manifest kebudayaan dianggap sebagai pendukung liberalisme yang mereka sebut humanisme universal. Membaca dan melihat kedua ideologi tersebut, dikaitkan dengan situasi politik, nampak jelas kedua ideologi tersebut merupakan produk kebudayaan yang berkembang pesat pasca perang dunia II, kedua ideologi tersebut mewakili 2 kutub kekuatan paling dominan di dunia pada saat itu yang diwakili Amerika Serikat sebagai blok barat pengusung liberalisme dan Uni Sovyet sebagai Blok timur pengusung komunisme.

Lekra sendiri didirikan oleh beberapa sastrawan, dan seniman yang sebagian diantaranya adalah penganut komunisme dan anggota PKI, salah satunya adalah Njoto. Sebagai catatan Njoto adalah orang kedua di jajaran pimpinan PKI setelah Aidit, meskipun begitu Njoto lebih didengar oleh orang-orang Lekra ketimbang Aidit, alasannya karena dia telah lama dikenal sebagai sastrawan, sementara Aidit tidak (Tim Penulis Tempo, 2010).

Jika dilihat dari situasi diatas, sangat jelas ada peran orang-orang komunis sebagai penyusun haluan organisasi Lekra. BRG (2018) berpendapat jika kehadiran Aidit dan khususnya Njoto sebagai tokoh Lekra dikemudian hari menghasilkan 2 kesimpulan, pertama Njoto adalah seorang komunis, pimpinan PKI, dan membawa Lekra menjadi organisasi komunis, dan kedua Njoto sebagai sastrawan yang kebetulan komunis, tergabung dalam organisasi kebudayaan yang se-ideologi dengannya. Untuk melihat seberapa jauh peran komunisme dan menentukan siapa yang mengarahkan Lekra sendiri dibutuhkan kajian lebih mendalam yang akan digambarkan pada bab selanjutnya.

Sementara itu, Manifest kebudayaan dikenal didirikan oleh orang-orang dari perkumpulan gelanggang, organisasi yang didirikan Chairil Anwar tersebut dikenal sebagai orang-orang yang sejak awal berjiwa bebas dan cenderung semau sendiri dan susah diatur (Herlambang. 2011, h.66) maka tidak mengherankan ketika Manifest Kebudayaan terlahir dengan mengusung humanisme universal, namun jika dilihat dari prespektif lain Herlambang (2011) melihat ada unsur politis dari faham yang mereka adopsi tersebut. Menurutnya, kelompok seniman dan sastrawan anti-Komunis menggunakan faham humanisme universal sebagai senjata untuk menyingkirkan dan membendung faham realisme sosialis. Bahkan menurutnya pernyataan sikap anti-Komunisme yang dilakukan kelompok manifesto kebudayaan pada 1963, terlahir karena adanya dukungan elemen-elemen sayap kanan seperti partai politik, militer, dan lembaga-lembaga swadaya serta filantropi Amerika Serikat.

Dari runutan diatas, adopsi ideologi liberalisme yang dilakukan Manifest Kebudayaan pun dapat disikapi dengan 2 kesimpulan, yaitu mereka sejak awal secara sadar memang berfikir liberal dan orang-orang liberal, atau seperti kutipan diatas, mereka ditunggangi kepentingan anti-Komunisme dan dengan tujuan tersebut maka mereka harus menjatuhkan realisme sosialis.

II.6 realisme sosialis Hendra Gunawan

Setelah memahami adanya persaingan diantara penganut realisme sosialis yang dalam bentuk lembaga direpresentasikan oleh kehadiran Lekra dengan kelompok seniman lain khususnya Manifest Kebudayaan, maka setiap tuduhan yang diarahkan kepada penganut realisme sosialis haruslah memperhatikan konteks situasi politik terlebih dahulu untuk kemudian lebih lanjut dilihat dari aspek lainnya.

Dalam penelitian ini aspek lain tersebut akan dilihat dari karya seorang pelukis beraliran realisme sosialis yang juga sekaligus tokoh Lekra, untuk kemudian menilai sejauh mana kebenaran akan tuduhan tersebut.

Berbicara mengenai Lekra dan realisme sosialis di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sosok Hendra Gunawan, pria yang merupakan putra dari Raden Prawiranegara dan Raden Odah Tejaningsih, pasangan bangsawan keturunan sumedang. Dikutip dari Buku Hendra Gunawan, Pelukis Rakyat (2013) Hendra sudah mulai melukis sejak duduk di HIS (Hollandsch-Inlandsche School) sekolah setingkat sekolah dasar bagi bumiputera, pada masa ini Hendra mulai melukis pemandangan, buah-buahan, hingga wayang kulit, objek yang dikemudian hari sangat mempengaruhi gaya lukisannya. Selepas menamatkan pendidikan SMP, pada awalnya Hendra mulai belajar melukis pada Abdullah Suriosubroto, kemudian pertemuannya dengan pelukis Barli, Affandi, Wahdi dan Sudarso membawa Hendra ke fase selanjutnya dalam perjalanan karir melukisnya, bersama mereka Hendra mendirikan Kelompok Lima Serangkai dan mulai belajar dari teman-temannya, dari Wahdi Hendra belajar melukis pemandangan sementara Affandi menginspirasi Hendra dalam menajamkan bentuk.

Selama zaman pendudukan Jepang, Hendra bergabung dengan Pusat Tenaga Rakyat, dalam organisasi tersebut Hendra mengajarkan para pemuda melukis dan membuat patung, mematumng sendiri dipelajari Hendra secara otodidak. Selepas Perang Dunia II, yang dikenal sebagai masa Revolusi Fisik, Hendra ikut bergabung sebagai tentara. Selama masa tersebut Hendra membentuk kelompok pelukis front bersama Barli, Abedi, Kerton, Turkandi dan Sudjana dan mulai menggambarkan situasi perang dan revolusi di garis depan pertempuran.

Selama bertahun-tahun ikut dalam perjuangan kemerdekaan sejak zaman Jepang hingga masa revolusi fisik membuat perhatian Hendra terhadap kehidupan rakyat kecil semakin kuat, Hendra yang selama masa perjuangan kemerdekaan selalu berada ditengah masyarakat mulai menangkap kehidupan rakyat kecil dan menggambarkannya dalam setiap lukisan, dengan pengalaman tersebut lahirlah karya-karya Hendra yang bertema kehidupan masyarakat kelas bawah, lukisan-lukisan yang keluar dari citra seorang Hendra yang berasal dari kalangan bangsawan.

Pada tahun 1946, Hendra merupakan pelukis pertama yang menyelenggarakan pameran pasca kemerdekaan, pameran yang dibuka oleh Presiden Soekarno

tersebut membuat Hendra menjadi salah seorang pelukis yang disukai Presiden Soekarno, tema-tema kerakyatan yang diangkat oleh Hendra memang merupakan tema yang disukai Presiden Soekarno, menurutnya tema-tema seperti itu menggambarkan kondisi Indonesia saat itu. Setahun kemudian Hendra bersama beberapa kawan lainnya mendirikan Sanggar Pelukis Rakyat, sanggar lukis yang dikemudian hari tergabung dalam Lekra, di sanggar ini pula karakter realisme sosialis Hendra semakin keluar, Hendra semakin produktif melahirkan karya-karya bertema kehidupan rakyat.

Pada tahun 1950 bersama Affandi, S.Sudjojono dan beberapa kawan lainnya Hendra mendirikan Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta, kampus yang banyak melahirkan seniman beraliran realisme sosialis pada masa itu, salah satunya maestro realisme sosialis Itji Tarmizi. Pada fase ini lingkungan Hendra Gunawan dikelilingi oleh seniman beraliran realisme sosialis yang merupakan anggota Lekra, keterlibatan Hendra dalam Lekra dimulai pada tahun tersebut dengan bergabungnya Sanggar Pelukis Rakyat yang didirikannya dengan Lekra.

Tahun-tahun selanjutnya Hendra telah dikenal sebagai tokoh Lekra dan salah satu maestro lukis beraliran realisme sosialis. Setelah menggelar pameran keduanya tahun 1953, Hendra kembali ke Bandung dan menjabat sebagai ketua Lekra Jawa Barat. Selama di Bandung bersama beberapa tokoh Lekra Jawa Barat Hendra sempat mendirikan Universitas Kesenian Rakyat, sebagai tandingan bagi fakultas seni rupa Institut Teknologi Bandung.

Di akhir tahun 1965, peristiwa Gerakan 30 September pecah, banyak tokoh PKI dan Lekra kemudian ditangkap dan diasingkan. Hendra menjadi salah satu yang ditahan oleh rezim Orde Baru, selama 13 Tahun hingga tahun 1978, Hendra ditahan di lembaga pemasyarakatan Kebon Waru Bandung. Selama didalam penjara Hendra bertemu 2 orang yang kelak merubah gaya melukisnya. Pertama Nuraeni Hendra, perempuan yang kelak menjadi istri keduanya menginspirasi Hendra dalam menemukan warna-warna baru dalam lukisannya, kemudian Syafe'i Soemardja, seorang mahasiswa seni rupa yang sempat kuliah di Belanda, lewat Syafe'i, Hendra belajar gaya lukis barat yang menggambarkan figure yang terdistorsi, selama masa

di penjara Hendra masih melukis dengan tema rakyat, namun pada fase ini juga banyak lahir lukisan yang menggambarkan kehidupan personal Hendra Gunawan.

Dari uraian singkat perjalanan karir melukis Hendra dapat dilihat bagaimana perjalanan hidup Hendra telah mempengaruhi bahkan merubah gaya melukisnya, satu yang tidak bisa lepas dari sosok Hendra adalah bagaimana dia menggambarkan sosok manusia dengan anatomi yang menyerupai wayang, juga seringnya Hendra mengangkat sosok perempuan kedalam lukisannya, yang menurut Sudarmadji (1998) menggambarkan kekaguman Hendra kepada sosok perempuan terutama ibunya. Selain kekhasan tersebut, sejak awal Hendra selalu menggambarkan tema rakyat, menunjukkan kepedulian dan kedekatannya dengan kalangan masyarakat kelas bawah, tema yang membuatnya dipandang sebagai salah satu maestro realisme sosialis.